

## Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Nur Aini<sup>1</sup>, Abdul Sabaruddin<sup>2</sup>, Yudi Agusman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

e-mail: [nurainiyusuf1098@gmail.com](mailto:nurainiyusuf1098@gmail.com)

### Abstrak

*Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kelurahan Anaiwoi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pendamping PKH, penerima manfaat, Lurah Anaiwoi, dan pegawai Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum efektif karena jadwal pencairan yang tidak menentu, gangguan jaringan, dan data penerima yang belum diperbarui. Meskipun penyaluran langsung ke rekening penerima cukup efisien, komunikasi antara pendamping dan penerima masih perlu ditingkatkan. Secara umum, PKH berdampak positif, namun diperlukan pembaruan data, peningkatan ketepatan sasaran, dan program pemberdayaan ekonomi agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Evaluasi, PKH, Program.

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu masalah mendasar yang masih dihadapi adalah kemiskinan, yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (Zahra, 2019). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatnya kesenjangan sosial, sehingga menuntut pemerintah untuk melakukan upaya serius melalui kebijakan dan program perlindungan sosial.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH telah diterapkan sejak 2007 dan secara resmi dilaksanakan di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka sejak 2014. Meski demikian, pelaksanaan PKH masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran, di mana sebagian bantuan diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria penerima, sementara keluarga miskin yang layak belum terjangkau. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program (Zahra, 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait PKH, namun sebagian besar bersifat umum dan belum menyoroti pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian khusus di Kelurahan Anaiwoi, yang dapat menggambarkan secara rinci kondisi nyata pelaksanaan PKH, kendala validasi data, dan faktor pendukung maupun penghambat program di tingkat lokal. Berdasarkan urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kelurahan Anaiwoi, menganalisis ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmiah

mengenai implementasi program bantuan sosial bersyarat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pendamping PKH untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, sehingga program dapat benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kelurahan Anaiwoi, menganalisis ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi program bantuan sosial bersyarat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pendamping PKH untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, sehingga program dapat benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Lokasi dipilih karena masih terdapat keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PKH, sementara sebagian masyarakat yang belum memenuhi syarat justru menerima bantuan. Informan dipilih secara purposive, meliputi pendamping PKH, fasilitator Dinas Sosial, aparat kelurahan, dan masyarakat penerima PKH. Data penelitian terdiri dari primer, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan, serta sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan laporan terkait PKH. Keabsahan data dijamin melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai efektivitas, ketepatan sasaran, serta kendala dalam pelaksanaan PKH

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kegiatan yang dilakukam untuk mengukur pencapaian tujuan program dalam waktu dan tempat tertentu pada aspek masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak. Evaluasi program harus dan dapat dilakukan secara terus menerus, berkala, dan sewaktu- waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang aatau setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan undang-undang program keluarga harapan No. 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan Pada Pasal 1 dalam undang-undang ini yang di maksud adalah program keluarga harapan yang selanjutnya di singkat PKH adalah program keluarga pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai sebagai penerima manfaat PKH. Berdasarkan teori yang kemukakan oleh William N. Nduun dalam setyawan (2017:160) terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan publik ialah Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada belum optimal dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, pencairan bantuan PKH seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulanan), yaitu Januari–Maret, April–Juni, Juli–September, dan Oktober–Desember. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak terdapat tanggal pencairan yang pasti di lapangan, dan prosesnya sering tertunda akibat kendala jaringan serta verifikasi data penerima. Ketidakpastian ini menyulitkan masyarakat dalam mengatur keuangan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rutin, terutama biaya pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, meskipun mekanisme penyaluran telah diatur secara triwulanan, ketidakjelasan jadwal pencairan menyebabkan efektivitas program PKH belum tercapai sepenuhnya. Efisiensi Di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada ialah dari sisi

efisiensi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik karena bantuan dikirim langsung ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat, sehingga meminimalisir keterlibatan perantara dan potensi penyimpangan. Kecukupan Bantuan yang diterima masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun demikian, bantuan tersebut belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rutin, karena pencairannya hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga daya jangkauannya terhadap kebutuhan harian atau mingguan masyarakat masih terbatas. Dengan kata lain, PKH membantu meringankan sebagian beban ekonomi keluarga, tetapi belum mampu menutupi seluruh kebutuhan dasar secara konsisten.

Pemerataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada belum optimal dan belum merata. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan berdasarkan kriteria keluarga miskin atau rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki anggota anak usia sekolah, ibu hamil atau menyusui, lansia, atau penyandang disabilitas, serta belum menerima bantuan sosial tunai sejenis. Namun, di lapangan terdapat keluarga yang memenuhi kriteria tersebut tetapi belum tercatat sebagai penerima PKH, sementara sebagian penerima mungkin masih menggunakan data lama dan tidak sepenuhnya sesuai kriteria terkini. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang berhak, sehingga efektivitas program dalam menjangkau seluruh KPM perlu ditingkatkan melalui pembaruan data dan pemetaan penerima yang lebih akurat. Responsivitas Sebagian besar masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, merespons program ini secara positif karena merasa bantuan sangat bermanfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan pokok lainnya. Pernyataan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan penerima manfaat, di mana mereka menyampaikan bahwa bantuan yang diterima cukup membantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar keluarga. Meskipun demikian, besaran nominalnya itu bervariasi dari 225.000-750.000, bantuan PKH bersifat tetap sesuai ketentuan pemerintah, dan tidak sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan rutin keluarga, sehingga program ini lebih berfungsi sebagai penunjang tambahan bagi kesejahteraan mereka. Ketepatan Sasaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil menjangkau sebagian besar keluarga yang benar-benar membutuhkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketepatan sasarnya belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil pengamatan dan tanggapan dari penerima manfaat, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH telah tepat sasaran pada sebagian penerima, namun masih terdapat sejumlah Masyarakat yang sangat layak secara kondisi ekonomi dan sosial namun belum terdaftar atau menerima bantuan tersebut.

## **Pembahasan**

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada diharapkan bisa berjalan dengan baik dengan membantu masyarakat miskin yang membutuhkan dan agar pemerintah berkomitmen melakukan Upaya peningkatan pada program ini agar dapat dilakukan penambahan kuota penerima manfaat PKH agar masyarakat yang miskin dan layak menerima bantuan bisa terdaftar sebagai penerima

bantuan PKH. Dan memastikan masyarakat penerima manfaat menjadi keluarga yang mandiri. Merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### **1. Efektifitas**

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana tujuan program berhasil dicapai. Dalam konteks PKH, efektivitas dinilai melalui pencapaian tujuan utama yaitu membantu peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Berdasarkan hasil analisis, PKH di Kelurahan Anaiwoi belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya dampak

langsung bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Ketidakpastian jadwal pencairan, hambatan teknis seperti gangguan jaringan, serta ketidakteraturan administrasi menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Pada dasarnya, efektivitas tidak hanya mengukur apakah bantuan sampai kepada penerima, tetapi juga seberapa jauh bantuan tersebut memberikan perubahan positif. Dengan banyaknya kendala teknis dan administratif, efektivitas PKH di Anaiwoi memerlukan penguatan sistem pelaksanaan agar hasilnya dapat lebih optimal.

**2. Efisiensi**

Efisiensi berkaitan dengan upaya menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada aspek penyaluran bantuan, PKH di Anaiwoi menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik karena dana dikirimkan langsung ke rekening penerima. Mekanisme ini mengurangi potensi penyimpangan dan mempercepat proses distribusi. Namun, efisiensi belum terlihat pada aspek komunikasi dan pembinaan. Masih terdapat perbedaan pemahaman terkait kewajiban dan tujuan PKH antara penerima manfaat dan pendamping. Kurangnya pertemuan rutin menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata. Dengan demikian, efisiensi PKH di Anaiwoi dapat dikatakan baik dalam mekanisme penyaluran, namun masih kurang dalam aspek koordinasi dan peningkatan kapasitas penerima manfaat.

**3. Kecukupan**

Kecukupan menggambarkan sejauh mana bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima. Analisis menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun tingkat kecukupannya masih terbatas, karena pencairan dilakukan setiap tiga bulan sehingga bantuan tidak selalu dapat menjangkau kebutuhan rutin yang muncul setiap bulan. Selain itu, kecukupan bantuan juga dipengaruhi oleh kurangnya pembaruan data, sehingga kondisi terbaru keluarga penerima tidak selalu tercermin dalam besaran bantuan. Agar aspek kecukupan lebih berkelanjutan, diperlukan dukungan tambahan berupa pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri dan jangka panjang.

**4. Pemerataan**

Pemerataan mengacu pada distribusi bantuan yang adil dan tepat sesuai dengan kebutuhan penerima. Di Kelurahan Anaiwoi, pemerataan PKH belum berjalan optimal. Masih terdapat keluarga yang memenuhi kriteria miskin tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pendataan dan pemutakhiran informasi. Karena penyaluran menggunakan data lama, distribusi bantuan tidak merata dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemerataan PKH sangat bergantung pada akurasi dan pembaruan data agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang tepat.

**5. Responsivitas**

Responsivitas menggambarkan kemampuan program dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Secara umum, penerima manfaat menilai PKH sebagai bantuan yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama untuk pendidikan anak dan kesehatan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program cukup responsif terhadap kebutuhan utama masyarakat miskin. Namun, keluhan mengenai ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa responsivitas program belum sepenuhnya optimal. Program baru dianggap benar-benar responsif apabila seluruh kebutuhan penerima diakomodasi dan keluhan terkait kesalahan sasaran dapat ditangani secara cepat.

**6. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran menunjukkan apakah bantuan telah diberikan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria. Berdasarkan analisis, sebagian penerima PKH sudah sesuai sasaran, namun masih terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan namun belum menerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data

calon penerima. Ketepatan sasaran menjadi indikator penting karena jika terjadi kesalahan dalam pendataan, tujuan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan pembaruan data secara berkala agar penetapan penerima lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Anaiwoi, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan manfaat bagi keluarga penerima dalam membantu kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari pencairan bantuan yang tidak teratur, kurangnya koordinasi antara pendamping dan penerima, serta pembaruan data yang belum dilakukan secara berkala sehingga masih ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran. Selain itu, masih ada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima PKH, sehingga pemerataan bantuan belum tercapai sepenuhnya. Secara keseluruhan, PKH sudah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam efektivitas, pemerataan, dan ketepatan sasaran agar tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dapat dicapai dengan lebih baik. Saran bagi peneliti selanjutnya bahwa Fokus pada aspek yang belum optimal seperti pemerataan, ketepatan sasaran, dan efektivitas pemberdayaan agar penelitian lebih tajam dan memberikan kontribusi yang lebih relevan bagi peningkatan program PKH.

## REFERENSI

- Akbar, E. al. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia. In *Ideas Publishing* (Issue March).
- Annissa, F. N. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga*. 9(2), 125–136.
- Arafat. (2023). *Buku Referensi Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. PT Literasi Nusantara abadi Grup.
- Beni, S. (2023). *Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Di Bengkayang Sabinus Beni 1, Veneranda Rini Hapsari 2, Benedhikta Kiky Vuspitasari 3 Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana, Indonesia*. 6, 398–404.
- Edu, E. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). *Social Science and Humanities Studies*, 1(2), 189–200.
- Herman, 2016. (n.d.). *Efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watubangga Kabupaten*.
- Janna, R. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*. 5–10.
- Jihan Serliana. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan. In *Sapto Pramono SAP* (Vol. 2, Issue 1).
- Maulina, I., Tugas, G. M., Kuliah, M., Pengampu, D., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Malikussaleh, U., & Utara, A. (2023). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. 1–14.
- Mufidah, S. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bondasari Kecamatan Wiradesa* (Vol. 1, Issue 2).
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Nurdiana. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*. 14(1), 55–64.
- Setyawan, W. N. dalam. (2017). indikator atau kriteria evaluasi kebijakan publik. *Social Science and Humanities Studies*, 1(2), 160.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung*. Cv Alfabeta.
- Susanto, H. (2016). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama*

Jakarta Selatan. *Skripsi*.

- Sutikno, C., Amanda, A., & Misbahudin, M. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Inovasi Daerah*, 1(2), 75–87. <https://doi.org/10.56655/jid.v1i2.26>
- Suyanti. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya. In *Jurnal Professional* (Vol. 9, Issue 2).
- Vidiana, N. (2021). *Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado Nikita Vidiana Senduk Burhanud*. VII(104), 11–18.
- Zahra., I. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mrngurangi Kemiskinan Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Humanis*, 05(02), 92–126.